

## Evaluasi Efektivitas SPIP dalam Menekan Risiko Fraud pada Pemerintah Daerah

<sup>1</sup>Cindy Cantika, <sup>2</sup>Clarissa Meggy Salwa, <sup>3</sup>Dede Lira Dwi Yanti, <sup>4</sup>Samantha Sundari Wijaya, <sup>5</sup>Rika Henda Safitri

<sup>12345</sup>Universitas Sriwijaya, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [01031282429055@student.unsri.ac.id](mailto:01031282429055@student.unsri.ac.id), [cindycantika030507@gmail.com](mailto:cindycantika030507@gmail.com)

### SEJARAH ARTIKEL:

Dikirim : 11-05-2026

Diterima : 12-05-2026

Dipublikasikan : 05-09-2026

### KATA KUNCI:

*Government Internal Control System; Fraud; Regional Government*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas risiko kecurangan yang terus-menerus terjadi dalam pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah, yang menunjukkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal pemerintah belum berfungsi secara efisien. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah dalam mengurangi risiko kecurangan melalui evaluasi sistematis terhadap temuan penelitian sebelumnya. Metodologi yang digunakan adalah tinjauan pustaka sistematis, yang melibatkan pengumpulan dan pemeriksaan artikel ilmiah yang relevan dari jurnal nasional dan internasional dalam jangka waktu tertentu, yang dipilih melalui proses identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penentuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembentukan sistem pengendalian internal pemerintah yang efektif, mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan, secara signifikan mampu mengurangi risiko kecurangan. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh komitmen kepemimpinan, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian, sistem pengendalian internal pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalkan risiko kecurangan di lingkungan pemerintahan daerah sehingga penerapannya perlu dilakukan secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

### ABSTRACT

*This study discusses the persistent risk of fraud in regional government financial management, indicating that the implementation of the government internal control system has not functioned efficiently. The study aims to evaluate the effectiveness of the government internal control system in reducing fraud risk through a systematic evaluation of findings from previous studies. The methodology used is a systematic literature review, which involves collecting and examining relevant scientific articles from national and international journals within a certain period, selected through the processes of identification, screening, eligibility assessment, and*

*determination based on predetermined criteria. The findings show that the establishment of an effective government internal control system, including the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, as well as monitoring activities, can significantly reduce the risk of fraud. This success is influenced by leadership commitment, the quality of human resources, and support from information technology. Therefore, the government internal control system plays a very important role in minimizing the risk of fraud in regional government environments, so its implementation must be carried out consistently, comprehensively, and sustainably in order to achieve effective and accountable governance.*

## PENDAHULUAN

Tuntutan akan tata kelola yang terbuka dan akuntabel meningkat seiring dengan evolusi konsep tata kelola yang baik. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki fungsi vital sebagai pengelola uang publik yang bertugas memastikan pemanfaatan sumber daya yang efektif, efisien serta tanpa adanya aktivitas kecurangan. Meskipun demikian, situasi saat ini menunjukkan bahwa berbagai jenis kecurangan, termasuk penyelewengan anggaran, distorsi laporan keuangan, dan korupsi, terus terjadi di sektor publik dan semakin marak, yang berdampak buruk pada perekonomian nasional (Dian et al., 2024).

Untuk mengurangi risiko kecurangan, pemerintah telah menetapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai alat pemantauan. SPIP adalah proses pemantauan berkelanjutan yang tertanam dalam semua aktivitas organisasi, yang dilaksanakan oleh para pemimpin dan karyawan untuk memastikan bahwa tujuan lembaga tercapai. Sistem ini merupakan bagian integral dari inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Ponadi et al., 2026). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang relevan.

Meskipun demikian, efektivitas SPIP dalam mengurangi risiko kecurangan di lingkungan pemerintah masih menunjukkan hasil yang sangat beragam. Menurut (Amsaroka et al., 2024) SPIP berperan penting dalam mencegah kecurangan melalui

penguatan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendeteksi adanya indikasi *fraud*. Namun, dari hasil penelitian tersebut juga menegaskan bahwa keberhasilan SPIP tidak hanya ditentukan oleh sistem pengendalian itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti komitmen para pimpinan, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas fungsi pengawasan.

Penelitian ini didukung oleh Teori *Agency* yang menjelaskan bahwa adanya kemungkinan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pengelola anggaran (*agent*) dan masyarakat sebagai pemberi amanah (*principal*) (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks tersebut, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi dan meminimalkan peluang kecurangan. Selain itu, teori *Fraud Triangle* yang dikemukakan oleh Donald Cressey menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Penerapan SPIP yang efektif dapat memperkecil unsur kesempatan sehingga potensi *fraud* dapat ditekan (Cressey, 1953).

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil cenderung konsisten. Penelitian (Mandasari et al., 2022) menemukan bahwa, SPIP memiliki pengaruh yang signifikan dalam mencegah terjadinya kecurangan dengan penerapan hukum yang tegas, dilakukannya analisis risiko, dan aktivitas pengendalian yang efektif oleh pimpinan. Sementara itu, penelitian dari (Shafira, 2026) juga menemukan bahwa semakin efektif pelaksanaan SPIP, maka semakin rendah juga terjadinya potensi kecurangan. Kemudian penelitian dari (Aprilia & Himawan, 2024) menunjukkan bahwa *good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud, baik secara langsung maupun melalui peran mediasi akuntabilitas.

Meskipun sejumlah penelitian menunjukkan bahwa SPIP memiliki peran dalam menekan risiko *fraud*, penelitian sebelumnya masih terbatas pada objek penelitian dan variabel tertentu sehingga belum mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai efektivitas penerapan SPIP pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan berbagai hasil penelitian terkait efektivitas SPIP dalam menekan risiko *fraud*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis dan menawarkan panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan mengembangkan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengurangi risiko kecurangan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA). PRISMA merupakan seperangkat pedoman minimum berbasis bukti yang dirancang untuk membantu peneliti dalam menyusun dan melaporkan tinjauan sistematis serta meta-analisis secara terstruktur (Simamora et al., 2024).

Proses penelitian mengikuti tahapan PRISMA yang meliputi identifikasi, penyaringan (*screening*), penilaian kelayakan (*eligibility*), dan tahap akhir (*inclusion*).

### **1. Tahap Identifikasi Artikel**

Penelusuran literatur dilakukan melalui database *Google Scholar* sebagai sumber utama. Pencarian artikel menggunakan kata kunci “SPIP”, “*fraud*”, dan “pemerintah daerah”, baik secara tunggal maupun dalam bentuk kombinasi, untuk memperoleh literatur yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, pencarian dibatasi pada publikasi dalam rentang tahun 2023–2026, guna memastikan kebaruan informasi. Dari hasil pencarian diperoleh sebanyak 132 artikel.

### **2. Tahap Penyaringan**

Setelah artikel terkumpul, proses seleksi awal dilakukan melalui penelaahan judul dan abstrak. Artikel yang tidak sesuai dengan fokus penelitian, memiliki isi yang sama (duplikat), atau tidak termasuk karya ilmiah tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya sehingga sebanyak 109 artikel dieliminasi. Artikel yang dipilih harus memenuhi kriteria inklusi, yaitu penelitian empiris yang membahas SPIP, *fraud*, dan pemerintah daerah. Sebaliknya, artikel yang tidak tersedia dalam bentuk teks lengkap (*full text*), tidak menjelaskan metode penelitian secara jelas, atau tidak memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian dimasukkan ke dalam kriteria eksklusi.

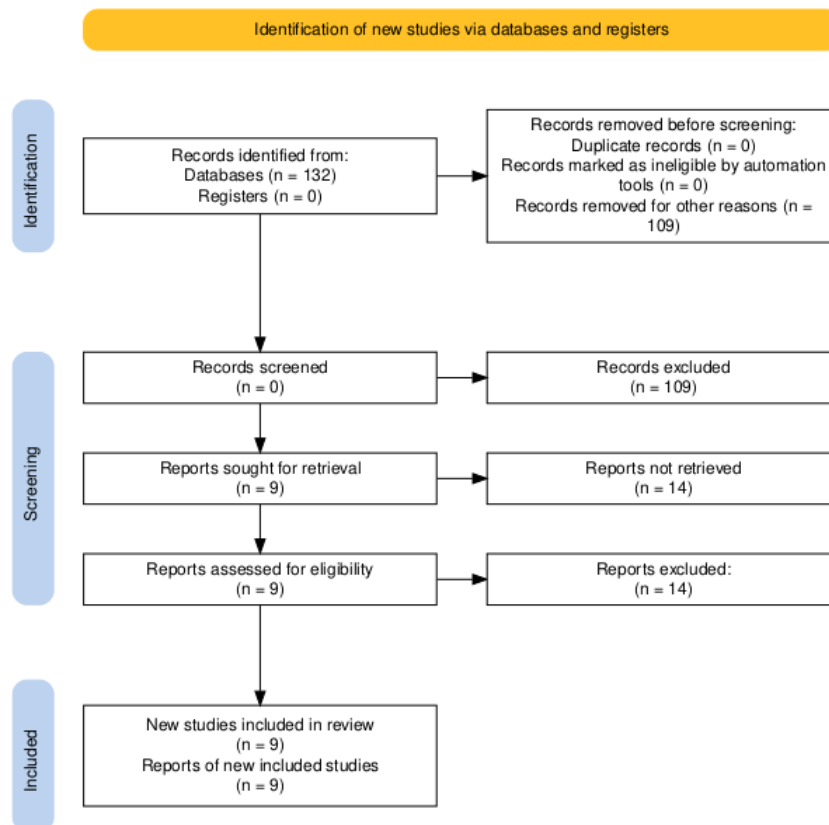
### 3. Tahap Penilaian Kelayakan

Artikel yang lolos pada tahap sebelumnya kemudian ditelaah secara lebih mendalam melalui pembacaan keseluruhan isi artikel untuk memastikan kesesuaian topik, tujuan penelitian, metode penelitian, serta hasil penelitian dengan fokus kajian yang dilakukan. Sebanyak 14 artikel dieliminasi karena tidak sesuai dengan fokus penelitian atau tidak menyajikan data yang relevan

### 4. Tahap akhir (*inclusion*)

Diperoleh sebanyak 9 artikel yang telah memenuhi seluruh persyaratan dan dinilai layak selanjutnya ditetapkan sebagai sampel akhir yang digunakan dalam proses analisis penelitian.

Seluruh tahapan penelitian dilakukan secara sistematis dan transparan sesuai dengan pedoman PRISMA. Hasil proses seleksi literatur selanjutnya disajikan dalam bentuk diagram alur PRISMA untuk menunjukkan jumlah artikel pada setiap tahap seleksi.



**Gambar 1. Prisma Flow Diagram**

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini ditampilkan hasil kajian literatur yang telah dipilih dengan menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR). “Penelitian-penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengurangi risiko *fraud* pada pemerintah daerah.

**Tabel 1. Kajian Literatur**

No .	Peneliti dan Tahun	Judul Jurnal	Hasil Penelitian
1.	Mangadil, C. N., Amir, A. M., & Taher, A. R. (2026)	“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> (Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah)”	Berdasarkan hasil telaah terhadap jurnal tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan upaya pencegahan <i>fraud</i> di lingkungan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta tingkat kompetensi auditor dalam melaksanakan prosedur audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif verifikatif dan melibatkan auditor pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah sebagai responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik secara bersama-sama maupun secara individu, SPIP dan kompetensi auditor memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan audit dalam mencegah kecurangan. Implementasi SPIP yang optimal mampu memperkuat sistem pengawasan, membantu proses identifikasi risiko, serta menyediakan informasi yang lebih andal bagi auditor (Mangadil et al., 2026). Sementara itu, kompetensi auditor berperan penting dalam

			<p>meningkatkan kemampuan analisis serta ketepatan dalam menemukan indikasi <i>fraud</i>. Sinergi antara pengendalian internal yang kuat dan auditor yang memiliki kemampuan memadai menjadikan proses audit lebih efektif dan adaptif terhadap berbagai potensi penyimpangan. Oleh karena itu, penguatan SPIP yang diiringi dengan peningkatan kompetensi auditor menjadi langkah strategis dalam menekan risiko <i>fraud</i> di sektor pemerintahan</p>
2	Meilantika, S., & Friyani, R. (2025)	<p>“Peran Pengendalian Internal Serta Tata Kelola Dalam Pencegahan Kecurangan Dan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Sektor Publik dan Swasta: <i>Systematic Literature Review</i>”</p>	<p>Berdasarkan hasil telaah terhadap jurnal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pengendalian internal dan tata kelola organisasi berperan penting dalam mengurangi potensi terjadinya <i>fraud</i> pada sektor publik maupun swasta. Melalui metode <i>Systematic Literature Review (SLR)</i> yang mengkaji 20 artikel dalam rentang waktu 2016–2025, diperoleh temuan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal, yang diperkuat oleh fungsi audit internal, penerapan prinsip <i>good governance</i>, serta dukungan teknologi digital seperti <i>e-government</i> dan sistem keuangan berbasis elektronik, mampu meningkatkan kualitas pengawasan serta menekan peluang terjadinya kecurangan. Selain itu, keberhasilan implementasi pengendalian internal juga dipengaruhi oleh faktor kualitas sumber daya manusia, budaya organisasi, serta komitmen pimpinan. Meskipun demikian, masih terdapat</p>

			<p>berbagai kendala seperti kurangnya integrasi sistem, keterbatasan kompetensi SDM, dan belum optimalnya budaya pengawasan yang dapat menghambat efektivitas sistem tersebut (Meilantika &amp; Friyani, 2025). Secara umum, hasil kajian ini menunjukkan bahwa penguatan sistem pengendalian internal yang terintegrasi dan adaptif, termasuk penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah, menjadi faktor kunci dalam upaya menekan risiko <i>fraud</i> secara berkelanjutan.</p>
3	Shafira, A. A. (2026)	<p>“Pengaruh Opini Audit, TLHP, SPIP, dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia”</p>	<p>Berdasarkan hasil analisis penelitian pada pemerintah daerah di Indonesia periode 2022–2023, ditemukan bahwa beberapa faktor pengawasan memiliki peran yang berbeda dalam menekan tingkat korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat korupsi, yang berarti semakin baik kualitas laporan keuangan, semakin optimal pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit, serta semakin kuat sistem pengendalian internal, maka potensi terjadinya korupsi akan semakin menurun. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa mekanisme pengawasan, baik internal maupun eksternal, berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, kapabilitas Aparat</p>

			<p>Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat korupsi, yang mengindikasikan bahwa peningkatan kapasitas pengawas internal belum tentu diikuti dengan efektivitas dalam praktik pengawasan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan independensi, sumber daya, maupun posisi kelembagaan APIP yang masih berada di bawah kepala daerah, sehingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan. Selain itu, nilai koefisien determinasi yang relatif rendah juga menunjukkan bahwa masih terdapat faktor lain di luar variabel yang diteliti yang turut mempengaruhi tingkat korupsi, seperti budaya organisasi, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengawasan yang lebih luas. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengendalian internal, khususnya SPIP, merupakan elemen kunci dalam upaya menekan risiko <i>fraud</i> di lingkungan pemerintah daerah (Shafira, 2026).</p>
4	Azfa Jaisy Effendi (2025)	“Peran Audit Internal Dalam Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Keuangan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat”	<p>Peran audit internal sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti memiliki andil penting dalam mengurangi potensi terjadinya <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan daerah, walaupun pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)</p>

			<p>telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan audit, <i>review</i>, monitoring, dan evaluasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti tingkat maturitas SPIP yang masih berada pada tahap berkembang, keterbatasan kompetensi yang dimiliki auditor, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan. Permasalahan tersebut berdampak pada masih ditemukannya temuan audit oleh BPK serta kasus kecurangan di lingkungan pemerintah daerah. Di samping itu, rendahnya kesadaran organisasi terhadap pentingnya pengendalian internal dan keterbatasan dalam akses data juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas pencegahan <i>fraud</i>. Meskipun begitu, berbagai upaya perbaikan terus dilakukan, di antaranya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat pelatihan, penguatan koordinasi antar perangkat daerah, serta pengembangan sistem audit berbasis teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan SPIP dalam menekan risiko <i>fraud</i> sangat ditentukan oleh peningkatan kompetensi auditor, penguatan sistem pengendalian internal, serta dukungan teknologi yang memadai untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel (Effendi, 2025).</p>
5	Muhammad Fikri	“Pengaruh Pengendalian	Berdasarkan hasil telaah terhadap jurnal tersebut, dapat dipahami bahwa efektivitas

	<p>Pratama (2025)</p>	<p>Internal, <i>Whistleblowing System</i>, Dan <i>Probity Audit</i> Terhadap Deteksi Kecurangan Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bojonegoro”</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang tercermin melalui penerapan pengendalian internal, memiliki peranan krusial dalam mengurangi risiko terjadinya kecurangan, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS-SEM serta melibatkan auditor dan aparatur Inspektorat Kabupaten Bojonegoro sebagai responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengendalian internal dan <i>probity audit</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan deteksi kecurangan, yang berarti semakin baik sistem pengendalian yang diterapkan, maka semakin besar peluang organisasi dalam mengidentifikasi potensi <i>fraud</i> sejak tahap awal. Di sisi lain, <i>whistleblowing system</i> tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa penerapannya belum optimal atau masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Temuan ini mengarah pada pentingnya penguatan SPIP, terutama pada aspek pengendalian internal dan pengawasan melalui <i>probity audit</i>, sebagai upaya efektif dalam menekan kemungkinan terjadinya <i>fraud</i> di lingkungan pemerintah daerah (Pratama, 2025).</p>
<p>6</p>	<p>Fajrianti, M. N.,</p>	<p>“<i>Whistleblowing System</i> (WBS)</p>	<p>Berdasarkan pembahasan dalam jurnal, efektivitas pencegahan <i>fraud</i> sangat</p>

	<p>Kamila, T. N., Mufidah, G. H., Choirunisa, S. Z., Aziza, N. N., &amp; Anwar, M. K. (2025)</p>	<p>Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah”</p>	<p>bergantung pada keselarasan antara sistem pengendalian internal, kepatuhan pelaporan keuangan, dan keberadaan mekanisme pelaporan pelanggaran. Implementasi SPIP terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam meminimalkan risiko penyimpangan karena menyediakan kerangka kerja yang mencakup penilaian risiko dan aktivitas pemantauan yang ketat. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa aspek sistem dan sistemnya sering kali memiliki peran yang lebih dominan dalam mencegah <i>fraud</i> dibandingkan faktor kompetensi individu atau sumber daya manusia semata (Fajrianti et al., 2025).</p> <p>Namun, SPIP tidak dapat berdiri sendiri secara optimal tanpa dukungan <i>Whistleblowing System</i> (WBS) yang berfungsi sebagai instrumen pendeteksi dini dengan bentuk pengawasan yang kolaboratif. WBS memungkinkan pelaporan tindakan curang secara aman, yang secara teoritis mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga publik. Meskipun demikian, efektivitas sistem ini masih sering menghadapi tantangan besar di lapangan, terutama terkait dengan budaya organisasi yang cenderung tertutup dan kurangnya jaminan perlindungan nyata bagi pelapor dari tindakan balasan atau intimidasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap efektivitas SPIP menunjukkan bahwa</p>
--	--	--	--

			<p>keberhasilan menekan risiko <i>fraud</i> memerlukan pendekatan menyeluruh; tidak hanya berfokus pada kecanggihan teknologi dan regulasi, tetapi juga pada komitmen kuat dari pimpinan daerah serta pembangunan budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan transparan.</p>
7	Hidayat, R (2026)	<p>“Pengaruh <i>Good Governance</i> Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Di Kecamatan Sigi Biromaru)”</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Sigi Biromaru, penguatan sistem pengendalian intern melalui pengawasan dan evaluasi rutin terbukti efektif dalam meminimalkan peluang terjadinya kecurangan, seperti penggelapan aset, <i>mark-up</i> anggaran, hingga laporan pertanggungjawaban yang fiktif. Secara parsial, penerapan prinsip <i>good governance</i> yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas juga berperan penting dalam memastikan setiap rupiah dana desa dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pihak principal. Hal ini sejalan dengan Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>), di mana mekanisme pengendalian internal dan eksternal diperlukan untuk mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Hidayat et al., 2026).</p> <p>Namun, efektivitas pencegahan <i>fraud</i> ini sering kali menghadapi berbagai tantangan nyata di</p>

			<p>lapangan, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka <i>Fraud Triangle Theory</i>. Faktor kesempatan (<i>opportunity</i>) muncul akibat lemahnya pemisahan tugas serta keterbatasan pemahaman aparat desa terhadap prosedur teknis SPIP. Meskipun praktik transparansi seperti musyawarah desa dan pengarsipan dokumen keuangan sudah mulai berjalan, kendala seperti perubahan regulasi yang dinamis dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia tetap menjadi hambatan dalam mencapai tata kelola yang optimal. Oleh karena itu, sinergi yang konsisten antara sistem pengendalian yang berjalan efektif dengan komitmen moral aparat sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa tidak hanya memenuhi formalitas administratif, tetapi benar-benar mampu menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik kecurangan.</p>
8	Rahmadani, S. (2023)	<p>“Pengaruh Pengendalian Internal Dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa”</p>	<p>Hasil telaah dari jurnal tersebut menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam sektor publik, khususnya melalui SPIP, bersama dengan praktik <i>good corporate governance</i> memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengurangi potensi terjadinya <i>fraud</i> pada pengelolaan dana desa. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang melibatkan aparat desa di Kecamatan Mranggen mengungkapkan bahwa kedua variabel tersebut memberikan pengaruh positif</p>

			<p>dan signifikan terhadap upaya pencegahan <i>fraud</i>, baik secara individu maupun bersama-sama, dengan tingkat kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 68,6%. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan unsur-unsur pengendalian internal, seperti lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan. Di sisi lain, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik—meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran—turut memperkuat mekanisme pengawasan serta meningkatkan akuntabilitas, sehingga mampu menekan risiko <i>fraud</i> dalam pengelolaan keuangan di tingkat pemerintah daerah (Rahmadani &amp; Sugiarto, 2023).</p>
9	Silvia, D., & Surya, A. (2023)	<p>“Efektivitas pengendalian Internal, <i>Whistleblowing System</i>, dan <i>Good Government Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Pengelolaan Dana</p>	<p>Hasil evaluasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa dipengaruhi secara kuat oleh kualitas pengendalian internal, keberadaan <i>Whistleblowing System</i> (WBS), serta penerapan <i>Good Government Governance</i> (GGG). Pengendalian internal yang diterapkan secara konsisten melalui SOP berperan sebagai alat deteksi dini terhadap potensi penyimpangan, sementara WBS membantu mengurangi peluang terjadinya kecurangan</p>

		Desa”	dengan menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan meningkatkan tanggung jawab aparatur. Selain itu, penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam GGG turut memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola. Secara bersama-sama, ketiga faktor ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pencegahan <i>fraud</i> , dengan tingkat pengaruh sebesar 49,5%, sehingga menjadi pendekatan yang efektif bagi pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan dana publik agar tetap akuntabel (Silvia & Surya, 2023).
--	--	-------	---

Ringkasan temuan penelitian pada tabel di atas menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara signifikan mengurangi risiko kecurangan di pemerintahan daerah. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SPIP yang efektif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian, dan membantu dalam deteksi dini potensi kecurangan.”

Temuan penelitian menunjukkan bahwa elemen-elemen penting SPIP, termasuk lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan aktivitas pemantauan, secara signifikan berkontribusi pada pencegahan kecurangan. Ketika semua elemen ini dilaksanakan secara efektif, sistem yang lebih transparan dan akuntabel akan terbentuk, sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.

Efektivitas implementasi SPIP sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat, khususnya auditor dan petugas pengawas internal pemerintah (APIP), selain variabel sistem. Auditor yang sangat kompeten lebih mahir dalam menganalisis risiko dan secara efektif mengidentifikasi tanda-tanda kecurangan. Hal ini

menunjukkan bahwa efektivitas SPIP tidak hanya bergantung pada sistem itu sendiri, tetapi juga pada kompetensi personel yang melaksanakannya.

Meskipun demikian, banyak penelitian telah mengidentifikasi beberapa hambatan dalam pelaksanaan SPIP, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang suboptimal, dan budaya organisasi yang kurang mendukung transparansi. Selain itu, pembentukan mekanisme tambahan, seperti sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*), menghadapi tantangan, terutama terkait perlindungan pelapor pelanggaran dan tingkat kepercayaan yang sangat rendah di dalam organisasi.

Lebih lanjut, implementasi konsep tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan, meningkatkan efektivitas SPIP dalam pencegahan kecurangan. Integrasi sistem pengendalian internal yang kuat dengan tata kelola yang baik akan menciptakan suasana yang mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sangat penting dalam mengurangi risiko kecurangan di pemerintahan daerah. Pelaksanaan SPIP yang efektif meningkatkan kemampuan pengawasan dan memfasilitasi identifikasi dini dan pencegahan potensi kecurangan.

Keefektifan SPIP bergantung tidak hanya pada sistem itu sendiri tetapi juga pada beberapa aspek pendukung, termasuk kualitas sumber daya manusia, dedikasi kepemimpinan, dan bantuan teknologi informasi. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Meskipun demikian, hambatan lain tetap ada dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem pengawasan yang tidak memadai, dan budaya organisasi yang tidak sepenuhnya mendukung transparansi. Oleh karena itu, upaya berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pelaksanaan SPIP guna memastikan fungsionalitas optimalnya dalam mengurangi risiko kecurangan di pemerintahan daerah.

## DAFTAR REFERENSI

- Amsaroka, M. H., Yadiati, W., & Winarningsih, S. (2024). *LITERATURE REVIEW: THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNAL CONTROL SYSTEM OF THE GOVERNMENT (SPIP), GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG), AND FRAUD PREVENTION*. 8(1), 122–136.
- Aprilia, P., & Himawan, I. S. (2024). *Pengaruh Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( SPIP ) Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi*.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*.
- Dian, M. R., Fitriana, & Paramarta, V. (2024). *PENGARUH SPIP DAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN, ANTI FRAUD AWARENESS SEBAGAI PEMODERASI DI KABUPATEN PURWAKARTA*. 7, 15781–15791.
- Effendi, A. J. (2025). *PERAN AUDIT INTERNAL DALAM PENCEGAHAN FRAUD PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT*. 1–13.
- Fajrianti, M. N., Kamila, T. N., Mufidah, G. H., Choirunisa, S. Z., Aziza, N. N., & Anwar, M. K. (2025). *Whistleblowing System ( WBS ) Sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah*. 04(01), 1423–1432.
- Hidayat, R., Syamsul, & Nurlailah. (2026). *PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Kantor Desa Di Kecamatan Sigi Biromaru)*. 3(1), 1–20.
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360*.
- Mandasari, S., Sulaiman, & Dwitayanti, Y. (2022). *Pengaruh SPIP Terhadap Pencegahan Kecurangan Atas Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Palembang*. 3(8).
- Mangadil, C. N., Amir, A. M., & Taher, A. R. (2026). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Kompetensi Auditor Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Prosedur Audit Dalam Pencegahan Fraud ( Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah ) The Influence of Government Internal Control System and Auditor Competence on the Effectiveness of Audit Procedure Implementation in Fraud Prevention ( At the Inspectorate Office of Central Sulawesi Province )*. 9(2), 2633–2639. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.10656>
- Meilantika, S., & Friyani, R. (2025). *Peran Pengendalian Internal Serta Tata Kelola Dalam Pencegahan Kecurangan Dan Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Sektor Publik dan Swasta : Systematic Literature Review*. 1(8), 971–984.
-

- Ponadi, Sosecco, T., & Qurrata, V. A. (2026). *ANALISA PERAN PENGAWASAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE EKONOMI DAERAH MELALUI PENDEKATAN INTERNAL CONTROL SYSTEM*. 4(1), 424–430.
- Pratama, M. F. (2025). *Pengaruh pengendalian internal, whistleblowing system , dan probity audit terhadap deteksi kecurangan pengadaan barang/jasa di kabupaten bojonegoro*.
- Rahmadani, S., & Sugiarto. (2023). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa*. 47–64.
- Shafira, A. A. (2026). *Pengaruh Opini Audit , TLHP , SPIP , dan Kapabilitas APIP terhadap Tingkat Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia*. 4(4), 10121–10131.
- Silvia, D., & Surya, A. (2023). *Efektivitas pengendalian Internal , Whistleblowing System , dan Good Government Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa*. 2(1), 468–473.
- Simamora, S. C., Gaffar, V., & Arief, M. (2024). *SYSTEMATIC LITERATUR REVIEW DENGAN METODE PRISMA: DAMPAK TEKNOLOGI BLOCKCHAIN TERHADAP PERIKLANAN DIGITAL*. 14, 1–11.